

**Berita Acara Kesepakatan Hasil Pembahasan Forum Lintas Perangkat Daerah
Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2045**

Pada Hari Kamis Tanggal Enam Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselenggarakan Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Jombang tahun 2025-2045 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- 1. Pemaparan materi oleh Bapak Tri Pitono selaku Tenaga Ahli penyusun dokumen Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2045;
- 2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil kesepakatan, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 16 November 2023
Jam : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Setjo Adiningrat Pemerintah Kabupaten Jombang

Forum Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 menyepakati hal-hal yang tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 16 November 2023
Pimpinan Sidang
an. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang
Sekretaris,

NOER HAJATI, S.Si

Mengetahui dan Menyetujui
Perwakilan Perangkat Daerah

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

I. Berikut adalah kesepakatan hasil pembahasan draft Rancangan Awal Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2045:

1. Dasar Hukum penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2045 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2023 tentang Penyusunan RPJPD 2025-2045

e. Surat Kemendagri Nomor: 600.11.2/8755/Bangda tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam RPJPD/RPJMD
2. Visi RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah: Jombang Religius, Unggul, Sejahtera dan Berkelanjutan, dengan arsitektur sebagai berikut:



3. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok:

Misi RPJPD	Arah Kebijakan				Sasaran Pokok	Indikator
	2025-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas	PENGUATAN KELEMBAGAAN & TATALAKSANA: Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) serta regulasi yang tertib. Implementasi Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien, terukur dan sesuai dengan prinsip - prinsip good governance [Poin 2, 3 & 4RB]	MANAJEMEN PERUBAHAN: Terciptanya budaya kerja positif bagi birokrasi yang melayani, bersih dan akuntabel melalui pemanfaatan TIK [POIN 1 RB].	AKUNTABILITAS DAN SISTEM PENGAWASAN: Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang berkualitas dan efektif serta efisien. [Poin 6 & 7 RB]	TATAKELOLA YANG BAIK: Terwujudnya Tatakelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik yang inovatif berbasis TIK [Seluruh Poin RB].Poin	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan pelayanan publik yang inovatif berbasis elektronik	1. Indeks Inovasi Daerah 2. Indeks Good Government (IGG)
Ekonomi Inklusif Bertumpu pada Industri, Perdagangan, Agrobisnis dan	Penguatan SDM, Kelembagaan, Sarpras, Modal dan Kebijakan Pendukung Fondasi	Pengembangan Sistim Agrobisnis sebagai Motor Penggerak Perekonomian yang	Penguatan Sektor Industri dan Perdagangan yang Bersinergi dengan Agrobisnis	Pemantapan Daya Saing Ekonomi Sektor Unggulan Level Regional,	1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi. 2. PDRB Per Kapita 3. Indeks Gini 4. TPT 5. Indeks

Pariwisata	Ekonomi yang Tangguh dalam Melindungi Seluruh Pelaku Ekonomi	Terintegrasi dengan Sector Lainnya.	melalui Inovasi Berbasis Teknologi.	Nasional dan Interasional.	2.Potensi dikelola optimal	Ketahanan Pangan
					Lokal secara	1. PDRB LU Perdagangan, 2. PDRB LU Industri 3. PDRB LU Pertanian 4. Indeks Keberlanjutan Usaha Tani 5. Rasio Kewirausahaan 6. Indeks Daya saing Daerah
SDM Unggul Berakhlak dan Kesejahteraan Sosial yang Merata	Penguatan kelembagaan (kebijakan, sistem pendukung) dan sumberdaya penyedia layanan Pendidikan-Kesehatan Berbasis Nilai Unggul dan Berakhlak	Perluasan Akses dan Pemantapan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan yang Relevan dengan Kebutuhan Lapangan Kerja Menyongsong Bonus Demografi.	Pemantapan Kaulitas SDM Berbasis Riset dan Inovasi serta Pemanfaatan Teknologi secara Berkelanjutan.	Mewujudkan SDM Jombang yang Unggul, Berakhlak serta memiliki Daya Saing Regional dan Nasional.	1. Terwujudnya SDM yang Unggul, Berakhlak dan Berdayasaing.	1. IPM 2. Indeks Pendidikan 3. Indeks Keluarga Sehat
	Penguatan Kelembagaan (kebijakan, sistem pendukung) dan sumberdaya penyedia layanan sosial dasar berdasarkan Nilai Kesetaraan / Keadilan.	Penguatan Kapasitas PPKS Guna Meningkatkan Kemandirian dan Kualitas Hidupnya melalui Integrasi Program Lintas Sektor (Cross Cutting Program)	Implementasi Sistem Penguatan Sosial Dasar yang Fokus dan Terencana yang Berdampak langsung Terhadap Peningkatan Derajat dan Kualitas Kehidupan.	Mewujudkan Kualitas Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas dan Merata Berbasis nilai-Nilai Kesetaraan dan Keadilan.	2. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang Merata.	1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, 2. Angka Kemiskinan
Infrastruktur Sarana Prasarana yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan	Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar secara berkualitas, merata dan pendukung perkembangan ekonomi serta kebencanaan.	Pemantapan infrastruktur pendukung nilai tambah ekonomi sektor potensial dan strategis serta mendukung konektivitas antar wilayah	Penguatan infrastruktur pendukung daya saing daerah, energi baru terbarukan (EBT) dan ramah lingkungan.	Perwujudan Infrastruktur Yang Efektif Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi, Kewilayahan Dan Daya Saing Daerah.	Kesinambungan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur
					Permukiman Berkelanjutan dengan Sarana Prasarana Berkualitas	Indeks Infrastruktur Permukiman
	Penguatan kelembagaan. Sumberdaya pendukung peningkatan daya dukung dan daya tampung wilayah	Penciptaan produksi dan kawasan ramah lingkungan berbasis pemanfaatan iptek dan inovasi	Perluasan dan pemantapan Peningkatan daya dukung dan daya tampung wilayah; Penciptaan produksi dan konsumsi ramah lingkungan yang merata serta pengembangan lptek dan inovasi berkelanjutan		Terciptanya Kualitas Lingkungan Hidup	1.IKLH 2.Indeks Ketahanan Daerah 3.Penurunan Intensitas Emisi GRK 4.Indeks Ketahanan Energi
Masyarakat yang Religius, Setara dan Tentram.	Penguatan Konsolidasi Kelembagaan Unsur Masyarakat Berbasis Nilai Agama, Sosial dan Budaya	Percepatan Cakupan Internalisasi Nilai-nilai Religius dan Inklusifitas serta Regulasi Kepada Masyarakat yang Bersinergi dengan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Penguatan Peran Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Penciptaan Suasana Kehidupan Masyarakat yang Inklusif, Setara, Tertib, Aman dan Tentram secara Berkelanjutan.	Mewujudkan Kehidupan yang Tertib, Aman dan Tentram berbasis Sistim Kelembagaan Sosial yang Kokoh.	Masyarakat yang Religius dan Inklusif.	Indeks Kesalehan Sosial
					Terwujudnya Kesetaraan dalam Masyarakat	1. Indeks Pembangunan Gender, 2. Indeks Pemberdayaan Gender
					Kehidupan yang Tertib, Aman dan Tentram.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum.

II. Saran dan Masukan:

1. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata:
- Indeks Pembangunan Pemuda dapat masuk menjadi salah satu indicator.
2. Kepala DPMD Kabupaten Jombang:
- Konsistensi seluruh Tim terhadap hasil pembahasan terutama pada keselarasan indicator.

- Mapping indikator secara rinci dan jelas.
3. Sekretaris Dinas PUPR:
- Jika fokus pada agrobisnis maka harus jelas dukungan terhadap infrstruktur pendukungnya dalam hal ini adalah kebutuhan air baku sawah/irigasi.

- Fenomena 5 tahun terakhir terdapat penurunan volume ketersediaan yang tidak sebanding dengan kebutuhan.
 - Harus dipikirkan pemenuhan air baku dan irigasi sehingga cukup untuk mengairi 48 ribu hektar sawah di Kabupaten Jombang, dimana 80% berada pada kewenangan pusat.
4. Wakil Direktur RSUD Jombang:
- Indikatot impact tetap dirunut, konsisten dan rinci sampai RPJMD sehingga tidak lagi ada perbedaan pendapat.
 - Pengukuran indicator harus dipastikan siapa yang menjadi penanggungjawab.
 - Pada misi ke-1, sasaran pokok tujuan utama adalah tata Kelola pemerintahan.
5. Perencana Inspektorat:
- Tim penyusun RPJPD tidak hanya dari kasubag sungram akan tetapi juga melibatkan auditor
6. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup:
- Bagaimana hasil RPJPD periode tahun 2005-2025
 - Harus bisa menangkap keinginan masyarakat yang ditangkap oleh Timses dan disinkronkan dengan RPJPD
 - Tim penyusun agar ditekankan pada kompetensi bukan hanya kompetensi kelembagaan termasuk perlunya Inspektorat masuk dalam Tim Penyusun.
7. Bapak Antok, bagian Organisasi:
- Mengusulkan cukup 1 (satu) sasaran pokok bisa IGG atau IRB saja (tidak keduanya).
8. Perencana BKPSDM:
- Jika sudah ada IPM, mengapa masih ada indeks Pendidikan
 - Terkait dengan “akhlak” mengusulkan diukur dengan Indeks Kesalehan Sosial